



Dewan Bahas Raperda Pencegahan Klitih

Keluarga diminta ikut berperan mencegah klitih di kalangan pelajar.

Iqbal Muhtarom
miqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah Ketahanan Anak yang bertujuan mencegah terjadinya klitih di kalangan pelajar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, mengatakan peraturan tersebut diharapkan bisa diterapkan tahun depan.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyetujui pembahasan rancangan perda tersebut meski saat ini sudah ada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, yang bertujuan memenuhi hak anak

melalui pengembangan sekolah, pelayanan kesehatan, dan kampung ramah anak. "Klitih sangat meresahkan, dan kami menyambut baik aturan itu," kata Octo.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki, mengatakan rancangan perda ini diharapkan mampu mencegah klitih. Raperda ini sudah sampai pada tahap penyusunan naskah akademik. Dia menjelaskan, poin penting raperda tersebut adalah setiap keluarga diminta mencegah pernikahan dini, klitih, dan berbagai kenakalan remaja lainnya. "Pemerintah wajib menekankan pentingnya menjaga harmonisasi keluarga kepada masyarakat," kata Fokki.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Budi Asrori,

mengatakan keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal punya peran penting untuk mencegah kekerasan remaja. Menurut dia, sekolah, orang tua, dan orang-orang di lingkungan remaja perlu bekerja sama mengantisipasi klitih. "Aspek psikis remaja patut menjadi perhatian. Buat mereka nyaman dan tidak tertekan," katanya.

Budi menuturkan, sekolah tidak bisa mengawasi siswa di luar jam belajar. Itu sebabnya diperlukan kerja sama atau perhatian serius dari guru, orang tua, dan orang-orang di lingkungan tempat tinggal remaja. Suasana dan lingkungan yang nyaman akan mendukung mereka berkembang dan mengasah keterampilan. Dia juga meminta sekolah aktif mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, di antaranya perisakan dan pelecehan seksual.

Data Jogja Police Watch menunjukkan, sejak tahun lalu, tercatat ada delapan kasus

klitih di DIY. Terakhir, pada Maret lalu, lham Bayu Fajar, pelajar SMP Piri 1 Yogyakarta, tewas disabet celurit sekelompok pelajar di Jalan Kenari, depan Balai Kota.

Pemberantasan klitih juga menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal tentang pemberantasan klitih akan dimasukkan ke rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum. Rancangan perda tersebut kini tengah dibahas Dewan bersama pemerintah.

Semula, materi dalam rancangan perda tentang ketertiban umum lebih mengarah pada pencegahan gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat, seperti tentang penindakan terhadap parkir liar. Namun, karena klitih marak terjadi, Dewan merasa perlu memasukkan pasal tentang pemberantasan kekerasan jalanan tersebut. ● SHINTA MAHARANI | PRIBADI WICAKSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas PMPPA			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005